



KTT COP-18 dan Kesiapan Indonesia

Humphrey Wangke^{*)}

Abstrak

KTT ke-18 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Doha, Qatar, berlangsung selama 2 minggu, dan diperpanjang satu hari, karena negara-negara peserta gagal mencapai kesepakatan. Pada dasarnya negara-negara di dunia menyadari telah terjadinya pemanasan global yang berakibat perubahan iklim karena perbuatan manusia, tetapi masih sulit mencapai kesepakatan untuk memulai upaya penyelamatan bumi. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan sekarang adalah menyelamatkan bumi oleh masing-masing negara. Indonesia sejauh ini telah melakukan upaya untuk mengurangi emisi CO₂ sesuai dengan tanggung jawabnya.

A. Pendahuluan

KTT ke-18 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) berlangsung di Doha, Qatar, dari 26 November s.d Desember 2012. Ada 2 persoalan besar yang dibahas, yaitu Protokol Kyoto periode kedua dan soal dana adaptasi dari negara maju untuk negara berkembang.

Protokol Kyoto periode pertama yang berakhir tahun 2012, negara-negara maju terikat kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam Konferensi Doha, para pihak harus mencapai kesepakatan negara mana saja yang harus mengurangi emisi, dan berapa besar penurunannya. Konferensi berhasil menyepakati perpanjangan Protokol Kyoto ke periode kedua, menggantikan periode pertama yang berakhir pada tahun 2012. Protokol Kyoto periode kedua ditargetkan akan dimulai tahun 2020.

B. Kegagalan Protokol Kyoto Periode Kedua

Kesepakatan Protokol Kyoto periode kedua tercapai tanpa melibatkan negara-negara maju yang selama ini menjadi penyumbang terbesar emisi karbondioksida (CO₂). Jepang, Rusia dan Kanada menyatakan keluar dari Protokol Kyoto. Sementara AS sejak awal memang tidak pernah mau menandatangani Protokol Kyoto karena dikhawatirkan akan mengganggu perekonomiannya. Dengan demikian, Protokol Kyoto periode kedua hanya melibatkan negara-negara Uni Eropa, Australia, Ukraina, Swiss dan Norwegia yang menghasilkan 15% emisi dunia, serta negara-negara di Asia. Pernyataan target pengurangan emisi baru akan diumumkan tahun 2014.

Selain gagal mencapai kesepakatan meningkatkan penurunan emisi CO₂, Konferensi Doha juga gagal menyepakati pendanaan 100 miliar USD per tahun

^{*)} Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dhanny.2000@yahoo.com

mulai tahun 2020 untuk membantu negara-negara miskin. Padahal pada COP ke-15 di Kopenhagen 2009, dijanjikan dana 100 miliar USD per tahun mulai tahun 2020 dan dana akan cair 30 miliar USD pada tahun 2013.

Kegagalan Konferensi Doha sangat disayangkan, sebab emisi CO₂ pada tahun 2012 telah meningkat 2,6% atau sekitar 58% lebih tinggi dibandingkan emisi 1990. Terbukti negara-negara di dunia telah menyalahi aturannya sendiri, sebab pada COP ke-16 di Cancun Meksiko tahun 2010 disepakati bahwa kenaikan suhu tidak boleh melebihi 2 derajat celsius jika ingin menyelamatkan bumi. Model iklim yang dibuat IPCC tahun 2007, antara lain menyebutkan, setiap kenaikan 2 derajat celsius diperkirakan permukaan air laut naik 18-38 sentimeter pada tahun 2100 dibandingkan kondisi tahun 1980-1999.

Sekjen PBB, Ban Ki Moon menyatakan hasil Konferensi Doha masih jauh dari harapan. Para aktivis lingkungan seperti *Climate Action Network International* dan *Environment Defence Fund* juga kecewa dan menyebut hasil Konferensi Doha sebagai "*Doha Climate Gateway*," sebuah ejekan bahwa Konferensi Doha telah gagal.

Semua negara di dunia pada dasarnya menyadari bahwa lingkungan hidup dunia kini sedang menghadapi krisis luar biasa. Ketika berlangsung "*World Ecological Safety Assembly*" di Denpasar, 9-10 Desember 2012, para peserta menyatakan keprihatinan atas bahaya kerusakan ekologi yang disebabkan perilaku manusia, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya.

Tapi sayang, ketika harus mengambil kesepakatan yang mengikat, justru banyak negara menghindar. Mereka lebih menghendaki pengurangan emisi berdasarkan kesepakatan nasionalnya.

C. Sumber Masalah

Dunia internasional menghadapi krisis lingkungan hidup karena tidak optimal mengimplementasikan fungsi lingkungan hidup. Fungsi-fungsi seperti fungsi mengatur (*ecological regulatory*), fungsi memelihara (*ecological*

maintaining), fungsi pemurni (*ecological recovery*), dan fungsi informasi (*ecological information*) praktis terabaikan karena keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam (SDA). Penelitian yang dilakukan lebih dari 2000 peneliti yang tergabung dalam IPCC menyebutkan, perubahan iklim berpotensi mengakibatkan dampak katastropik yang memusnahkan kehidupan.

Tidak optimalnya fungsi lingkungan hidup dikarenakan salah satu cara manusia melanjutkan kelangsungan hidupnya adalah dengan mengorbankan SDA, yaitu memanfaatkan SDA tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keterbatasan SDA yang akhirnya berdampak negatif pada keberlanjutan SDA dan lingkungan.

Bumi kini menghadapi krisis serius yang dapat mengancam kelangsungan seluruh penghuninya. Indikasinya adalah kian menipisnya cadangan sumber daya alam (SDA), sementara sumber daya hayati, baik ekosistem maupun spesies (flora dan fauna), banyak yang hilang atau musnah. Keadaan itu diperburuk dengan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, udara, dan air. Saat ini laju degradasi SDA dan lingkungan jauh lebih tinggi jika dibandingkan laju kemampuan manusia melakukan upaya perbaikan.

Daya dukung bumi terganggu karena pemanasan global. Dalam Konferensi Doha terungkap, dengan tingkat emisi seperti saat ini, kenaikan suhu bumi 4 derajat celsius tak terhindarkan. Karena itu, pengelolaan SDA secara berkelanjutan mempunyai nilai yang sangat strategis bagi masa depan bumi. Karena itu, masalah manusia saat ini adalah mendahulukan kepentingan ekonomi atau lingkungan hidup. Ketika disadari kondisi lingkungan hidup semakin terdegradasi, seharusnya manusia segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya. Rajendra Pachauri, Ketua IPCC mengatakan, kemungkinan besar laporan IPCC tahun depan akan menyebut aktivitas manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim.

"*Durban Platform*," sebuah dokumen penting yang dihasilkan dalam pertemuan puncak COP-17 di Durban, Afrika

Selatan, November 2011, menegaskan komitmen global untuk menyeimbangkan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup melalui pendekatan ekonomi hijau (*green economy*). Semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, harus mengurangi emisi mereka. Namun ternyata hasil Konferensi Doha masih jauh dari kesepahaman di antara negara-negara anggota tentang pentingnya implementasi pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan termasuk dampaknya terhadap *biodiversity*.

Dalam beberapa dasa warsa ke depan, tuntutan ketersediaan makanan, air dan energi akan meningkat drastis mengingat meningkatnya jumlah populasi global dari 7,1 miliar menjadi 8,3 miliar. Tuntutan ini dengan sendirinya akan memperburuk perubahan iklim mengingat harus terpenuhinya kebutuhan tersebut. Bumi kini semakin basah oleh banjir ketika musim hujan dan semakin kering dan sulit ditanami saat musim tanam. Dalam kondisi seperti ini, negara berkembang membutuhkan dana adaptasi, pembangunan kapasitas, dan teknologi mengingat dampak perubahan iklim yang semakin mengancam.

D. Kesiapan Indonesia

1. Green Economy

Kerusakan ekologi terbesar di Indonesia adalah kebakaran gambut dan deforestasi, bukan karena industrialisasi. Hampir 80% emisi karbondioksida berasal dari kebakaran gambut dan deforestasi. Karena itu, pada tahun 2011 Indonesia mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Di bawah rencana ini, pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan gambut mencapai 672 juta ton pada tahun 2020 dan lebih dari 1 miliar ton jika ada negara lain yang membantu. Sektor energi dan transportasi akan mengurangi emisinya hingga 56 juta ton, dan dari pengelolaan limbah sebanyak 78 juta ton.

Implementasi dari RAN tersebut telah memperlihatkan kemajuan yang berarti. Di sektor kehutanan, deforestasi telah menurun dari 3,5 juta Ha per tahun menjadi 0,5 juta Ha per tahun.

Penurunan terjadi karena, sejak tahun 2009, hampir 2,6 juta hutan di Indonesia telah mengantongi sertifikat *Forestry Stewardship Council* (FSC) sehingga tidak dapat lagi melakukan ekspor kayu secara sembarangan.

Kemudian sejak Mei 2011, Indonesia telah melakukan moratorium mengeluarkan lisensi baru untuk eksploitasi hutan alam dan gambut. Kebijakan penanaman sejuta pohon sejauh ini justru menghasilkan penanaman 3,2 juta pohon. Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tahun 2009 juga turut membantu pencapaian-pencapaian tersebut, sebab hanya kayu yang memiliki sertifikat yang boleh diperdagangkan di pasar internasional.

Ada juga kesepakatan membentuk *Heart of Borneo* (HoB) yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan Brunei. Melalui kesepakatan ini akan ada 22 juta hutan di Kalimantan yang akan dikelola secara berkelanjutan.

Banyak hutan di Indonesia yang beralih fungsi (konversi) menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun mulai tahun 2010 pemerintah telah menyiapkan skema *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang harus dimiliki oleh semua perusahaan minyak sawit.

2. Blue Economy

Indonesia mempunyai 5.8 juta kilometer persegi kawasan pesisir. Dua pertiga dari kawasan itu dilindungi oleh terumbu karang yang juga mempunyai fungsi menjaga keanekaragaman kehidupan di laut. Terumbu karang di Indonesia mencapai 15% dari total terumbu karang dunia. Untuk menjaga kelestariannya, Indonesia telah menyepakati dibentuknya *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang melibatkan Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Malaysia dan PNG.

Pembentukan CTI ini tidak terlepas dari rusaknya terumbu karang di Indonesia. Hanya tersisa 30% terumbu karang Indonesia yang berada dalam kondisi baik. Rusaknya terumbu karang Indonesia tidak terlepas dari kebiasaan nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Karena itu, pemerintah Indonesia mulai memperbaharui teknologi

menangkap ikan. Langkah lain yang ditempuh adalah dengan melakukan akuakultur.

E. Tantangan Indonesia

Di Indonesia, secara spesifik, upaya perlindungan dan pelestarian alam telah dilakukan meskipun belum berjalan sesuai harapan. Lahan-lahan hutan yang rusak dan telantar hingga saat ini diperkirakan masih mencapai puluhan juta Ha. Ekosistem lahan basah dan terumbu karang masih banyak yang mengalami kerusakan.

Untuk mengelola SDA secara bertanggung jawab, Pemerintah Indonesia telah menetapkan departemen-departemen yang bertanggung jawab dalam urusan energi dan sumberdaya mineral (ESDM), sumber daya pertanian, sumber daya kehutanan, dan sumber daya perikanan, yaitu masing-masing Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perikanan dan Kelautan, di samping Kemen-LH yang bertanggung jawab mengamankan kegiatan pembangunan dari segi lingkungan hidup.

Keempat SDA strategis yang dikawal masing-masing kementerian tersebut merupakan tulang punggung pembangunan dan ekonomi negara. Kemampuan dan kapasitas masing-masing kementerian yang masih terbatas telah menyebabkan tidak termonitor dan terselesaikannya masalah kerusakan SDA dan lingkungan. Permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi jika masing-masing sektor dapat bekerja secara optimal dan terintegrasi atas dasar pendekatan ekonomi dan ekologis secara seimbang, yaitu dengan cara meningkatkan tata kelola pemerintahan (*governance*) terhadap perlindungan lingkungan hidup.

F. Penutup

Negara-negara di dunia dituntut peduli terhadap ancaman kerusakan ekologi akibat eksploitasi yang berlebihan. Kepedulian itu tidak cukup sebatas komitmen, namun juga perlu langkah-langkah konkrit menyelamatkan bumi melalui pengurangan emisi

CO₂. Masyarakat dunia hendaknya memanfaatkan SDA sesuai daya dukung dan menggunakan bahan bakar non-fosil di dalam pengelolaannya. Masa depan pemeliharaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab semua, demi pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.

Indonesia telah melakukan upaya-upaya pengurangan emisi untuk kegiatan eksploitasi di darat maupun di laut. Upaya ini mungkin belum memperlihatkan hasil maksimal, tetapi ke depan Indonesia berpotensi menurunkan emisi seperti yang dijanjikan. Untuk itu Indonesia perlu memperbaiki koordinasi di antara sektor-sektor yang bertanggung jawab agar memudahkan monitoring dan evaluasi. DPR harus melakukan tugas pengawasan dengan cermat agar tanggung jawab Indonesia melakukan pengurangan emisi CO₂ dunia dapat berjalan baik.

Rujukan:

1. "AS Keluar dari Protokol Kyoto," *Media Indonesia*, 10 Desember 2012, hal. 15.
2. Brigita Isworo Laksmi, "Doha dan Ilmu Pengetahuan yang Terpedaya," *Kompas*, 12 Desember 2012, hal. 15.
3. Brigita Isworo Laksmi, "PR dari "Doha-Jakarta," *Kompas*, 11 Desember 2012, hal. 14.
4. "COP Ke-18 Ancam Masyarakat Adat," *Kompas*, 5 Desember 2012, hal. 15.
5. "2015, Dana Konservasi Berlipat," *Kompas*, 23 Oktober 2012, hal. 13.
6. "Emisi Gas Rumah kaca Dunia Naik 3 Persen," *Kompas*, 1 Desember 2012, hal. 13.
7. "Kesepakatan Soal Dana Amat Lemah," *Kompas*, 9 Desember 2012, hal. 11.
8. "Konperensi Adaptasi Diabaikan," *Kompas*, 5 Desember 2012, hal. 14.
9. "Kalahkan Ancaman Perubahan Iklim," *Kompas*, 12 Desember 2012, hal. 10.
10. "Perundingan di Doha Buntu," *Kompas*, 8 Desember 2012, hal. 13.
11. "Protokol Baru Diperjuangkan," *Kompas*, 27 November 2012, hal. 13.
12. "Tak Ada Kebijakan Politik Tentang Perubahan Iklim," *Kompas*, 10 Desember 2012, hal. 12.